

KETIDAKSETARAAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT ADAT SUMBA TIMUR DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Nama : Anggita Putri Betrix Djara Liwe

Jurusan / Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Pembimbing : Ibu Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum

Bapak Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika ketidaksetaraan sosial dalam masyarakat adat Sumba dari perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta mengkaji upaya pemerintah dalam mengharmonisasikan nilai adat istiadat setempat dengan prinsip-prinsip HAM universal. Permasalahan utama yang diangkat adalah eksistensi sistem stratifikasi sosial yang melahirkan praktik perbudakan modern melalui mekanisme sistem *Ata Pa'kei* (hamba yang dibeli), di mana individu dari golongan tertentu dapat ditukar dengan hewan ternak untuk dijadikan pelayan tanpa hak-hak dasar yang layak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta didukung dengan hasil wawancara lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem *Ata Pa'kei* secara sadar menempatkan kelompok Ata dalam kondisi penguasaan total oleh golongan Maramba, yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan diri, terbatasnya akses pendidikan, serta kerentanan terhadap kekerasan fisik dan seksual. Dari analisis jaminan konstitusional Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 20 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ditemukan bahwa sistem ini memenuhi unsur pelanggaran hak yang bersifat *non-derogable*, antara lain: adanya praktik perbudakan, diskriminasi berdasarkan garis keturunan, serta pengabaian martabat kemanusiaan. Meskipun negara menghormati hukum adat, namun pengakuan tersebut dibatasi oleh syarat kepatutan terhadap prinsip negara hukum dan kemanusiaan. Oleh karena itu, negara secara hukum berkewajiban melakukan intervensi melalui harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang aktif, serta edukasi sosiokultural untuk menghapus unsur budaya yang eksploitatif demi mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat adat Sumba.

Kata kunci: *Masyarakat Adat Sumba, Ketidaksetaraan Sosial, Ata Pa'kei, Hak Asasi Manusia, Perbudakan Modern.*

SOCIAL INEQUALITY IN THE INDIGENOUS SOCIETY OF EAST SUMBA FROM A HUMAN RIGHTS RIVIEW

Name : Anggita Putri Betrix Djara Liwe

Discipline / Study Programme : Hukum/ Ilmu Hukum

Contributor : Ibu Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum

Bapak Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H.

ABSTRACT

This research aims to analyze the problem of social inequality within the indigenous society of Sumba from the perspectives of law and human rights, as well as to examine the role of the government in harmonizing local customary values with universal human rights principles. The primary issue addressed in this study is the persistence of a social stratification system that gives rise to modern forms of slavery through the Ata Pa'kei system (purchased servants), in which individuals from certain social groups may be exchanged for livestock and forced to serve without access to basic human rights. This study employs a normative juridical legal research method, using a statutory approach and a conceptual approach, conducted through a literature review of primary and secondary legal materials, supported by field interview findings. The analysis demonstrates that the Ata Pa'kei system deliberately places the Ata group under the total control of the Maramba (nobility), resulting in the loss of personal liberty, limited access to education, and increased vulnerability to physical and sexual violence. Based on the analysis of constitutional guarantees under Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 20 paragraph (1) of Law No. 39 of 1999 on Human Rights, this system fulfills the elements of violations of non-derogable rights, including practices of slavery, discrimination based on lineage, and the denial of human dignity. Although the State recognizes customary law, such recognition is legally limited by the principles of the rule of law and humanity. Therefore, the State has a legal obligation to intervene through regulatory harmonization, active law enforcement, and socio-cultural education in order to eliminate exploitative cultural practices and to achieve equality for the indigenous people of Sumba.

Keywords: *Indigenous People of Sumba, Social Inequality, Ata Pa'kei, Human Rights, Modern Slavery.*